

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Aktor Kebijakan Nonformal dalam memberikan gagasan pada mutu pendidikan dan Pendidikan vokasi berkelanjutan. Peran aktor kebijakan nonformal dalam kemitraan Public Private Partnership (PPP) pada pendidikan vokasi berkelanjutan melalui agenda setting kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta jalur domisili. Aktor kebijakan nonformal menjadi informan dapat menjembatani publik antara sekolah dan masyarakat.

Tahapan Program PPP bidang Pendidikan vokasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sekolah SMK Swasta jalur domisili yang dilakukan aktor kebijakan nonformal bersama sekolah SMK Swasta Jakarta meliputi:

a. Persiapan

Bagaimana dilakukan pemetaan kebutuhan warga di tingkat Rukun Tetangga akan Pendidikan vokasi berkelanjutan dari lulusan SMP melalui penguatan petunjuk teknis pendaftaran Sekolah SMK Swasta Jalur Domisili, sosialisasi tentang SMK Swasta Jalur Domisili dengan jurusan jurusan kompetensi yang siap kerja, serta pendaftaran formulir dan surat pengantar oleh Pengurus Rukun Tetangga.

b. Pelaksanaan

Pada saat pelaksanaan program pendaftaran ke SMK Swasta Jalur Domisili ini dilakukan ini pihak sekolah SMK Swasta sudah memahami calon peserta didik baru darimana asal domisili melalui surat pengantar RT.

c. Tindak Lanjut

Pihak sekolah SMK Swasta Jalur Domisili menindak lanjuti pelaksanaan program PPP bidang Pendidikan vokasi berkelanjutan ini dengan membuat laporan sejumlah peserta didik baru yang diterima di SMK Swasta Jalur Domisili.

Pendidikan vokasi berkelanjutan sebagai candra dimuka sumber daya manusia yang terdidik, handal, mampu menjawab segala tantangan. Aktor kebijakan nonformal Pengurus lingkungan RT dan RW menjadi inisiator yang menjadikan warga berdaya, dan menguatkan kelembagaan Pendidikan vokasi sekolah SMK swasta untuk tumbuh berkembang dalam proses pemerataan Pendidikan untuk mencapai nilai-nilai kepublikan keadilan, persamaan dan keterbukaan sebagai landasan pengurus lingkungan RT dan RW menjadikan Indonesia berkemajuan. Peran serta Pengurus lingkungan Rukun Tetangga dan Rukun Wilayah merupakan keterlibatan yang nyata dalam pendidikan vokasi.

## **5.2 Rekomendasi Kebijakan**

Untuk pemerintah: segera menguatkan dan membina sekolah SMK swasta untuk tercapainya nilai-nilai kepublikan bersama multi stakeholder yang pada hilirisasinya pemerataan Pendidikan. Kemitraan PPP antara lingkungan RT dan RW dengan SMK Swasta ditingkatkan menjadi formulasi kebijakan pemerataan Pendidikan vokasi dengan mensosialisasikan kemitraan PPP pada PPDB SMK Swasta jalur domisili dan memberdayakan jurusan atau program studi yang bisa menyerap tenaga kerja dari lulusan SMK secara paripurna. Untuk panitia/sekolah SMK swasta: Pelayanan kepada masyarakat ditingkatkan dengan update terbaru informasi PPDB SMK swasta jalur domisili.

Untuk pengurus lingkungan RT dan RW: peningkatan pelayanan pada warga calon peserta didik baru yang akan melanjutkan Pendidikan vokasi di sekolah SMK swasta jalur domisili melalui Public Private Partnership (PPP) bidang pendidikan. Warga dengan kelemahan ekonomi dapat terbantuan oleh aktor kebijakan nonformal terkait administrasi Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Program Indonesia Pintar (PIP), serta koordinasi bantuan uang pangkal masuk sekolah SMK swasta dengan Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Untuk masyarakat dan peserta didik: Mematuhi segala aturan dan ketentuan pada kemitraan PPP pada PPDB SMK Swasta Jalur Domisili dapat memberikan program Pendidikan vokasi berkelanjutan secara efektif.